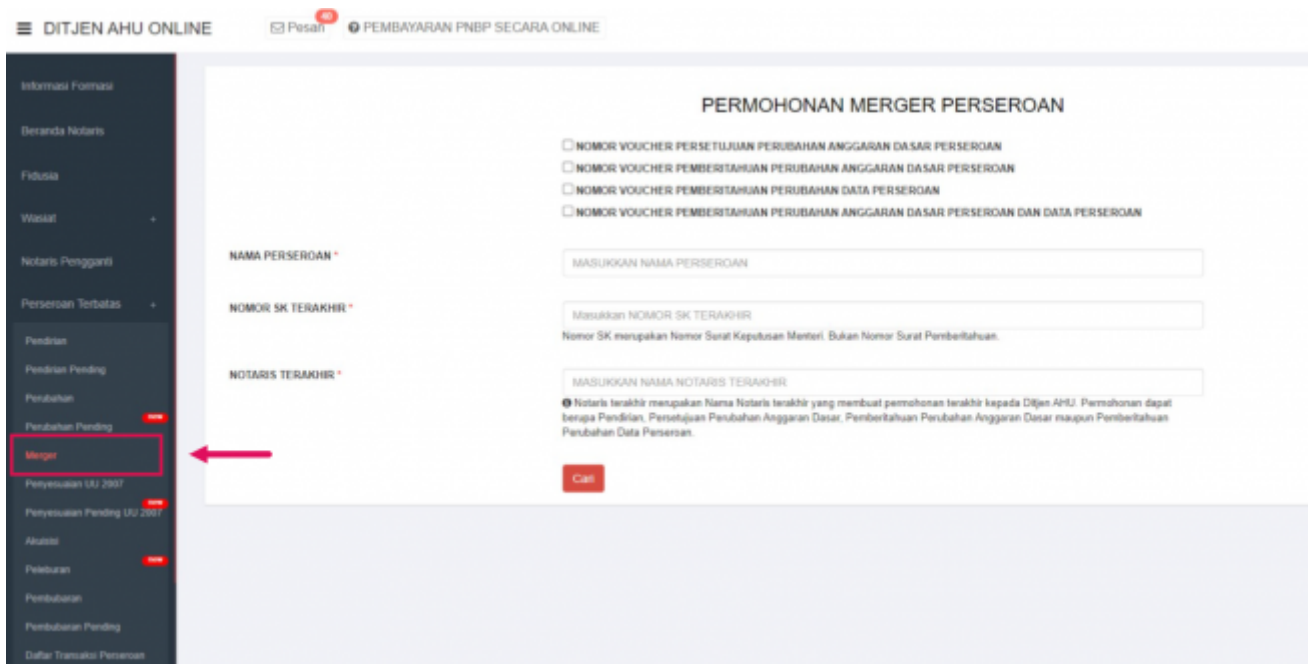


Merger (Penggabungan)

Menu Merger digunakan oleh Notaris untuk melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) PT (Perseroan Terbatas) atau lebih.

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas** → **Merger** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



a. Pemesanan dan Pembayaran Voucher PNBPN

- Kemudian tampil halaman **Permohonan Merger Perseroan** dibawah ini.

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *
Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *
Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Pada halaman **Permohonan Merger Perseroan** terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 sampai 3, maka akan muncul *field* nomor *voucher* sesuai yang dipilih dan otomatis point 4 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Notor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
Notor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
Notor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 dan 4, maka akan muncul *field* nomor *voucher* sesuai yang dipilih dan otomatis point 2 dan 3 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR P

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

3. klik **disini**
4. kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *


Pembelian voucher sebesar Rp 1.000.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol , lalu tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

Cek Pemesanan Voucher List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER : -
BILL ID^[1] : -
NAMA PEMOHON : -
NOMOR REKENING : -
EMAIL PEMOHON : -
NOMOR HP : -
TANGGAL TRANSAKSI : -
TANGGAL EXPIRED : -
(PEMBAYARAN TERAKHIR)
TAGIHAN : Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN : **BELUM BAYAR**

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi Kode Voucher/Bill ID Pelayanan Jasa Hukum Status

Dari Sampai PENCARIAN KODE VOUCHER -- SEMUA -- -- SEMUA --

Cari

* Keterangan :
1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik **Lanjutkan Transaksi** untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

3. klik **disini**
4. kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

BELI

Pada halaman Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.


Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Cek Pemesanan Voucher **List Voucher** ←



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	: -
BILL ID ^[1]	: [blurred]
NAMA PEMOHON	: [blurred]
NOMOR REKENING	: [blurred]
EMAIL PEMOHON	: [blurred]
NOMOR HP	: [blurred]
TANGGAL TRANSAKSI	: 18 Agustus 2019 10:22:08
TANGGAL EXPIRED	: 21 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	
TAGIHAN	: Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	: BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

*** Keterangan :**

- 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
- 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
- 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1121 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor *Voucher*

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

3. klik **disini**
4. kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

BELI

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

- PILIH--
- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

• Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Data Perseroan Terbatas

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan


Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

Cek Pemesanan Voucher **List Voucher**



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	: -
BILL ID ^[1]	: [REDACTED]
NAMA PEMOHON	: [REDACTED]
NOMOR REKENING	: [REDACTED]
EMAIL PEMOHON	: [REDACTED]
NOMOR HP	: [REDACTED]
TANGGAL TRANSAKSI	: 14 Agustus 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	: 31 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	
TAGIHAN	: Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	: BELUM BAYAR

*** Keterangan :**

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download **Kirim Ulang**

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

*** Keterangan :**

- 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
- 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
- 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas	<input type="text"/>	Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi 

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor *Voucher* Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor *Voucher* Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor *Voucher*

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

3. klik [disini](#)
4. kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor *Voucher* Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

BELI

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu:

- PILIH--
- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

Pembelian voucher sebesar Rp 150.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan


Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran**

Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas

Cek Pemesanan Voucher **List Voucher** ←



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^(*)	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

b. Form Permohonan Merger

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN:

! Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan mengisi

1. **Nama Perseroan**
2. **Nomor SK Terakhir**
3. **Notaris Terakhir**

4. Lalu klik tombol

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

i Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.



- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Permohonan Merger Perseroan**

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

820

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

AHU-

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

ⓘ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU-

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
NEGARA REPUBLIK INDONESIA		Tanpa Klasifikasi : 30
		Tanpa Klasifikasi : 120
	DIREKTUR	
	DIREKTUR	
	PRESIDEN KOMISARIS	
	KOMISARIS INDEPENDEN	

Persyaratan Utama

1

- I. Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
 RUPS
- II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- V. NPWP

2

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

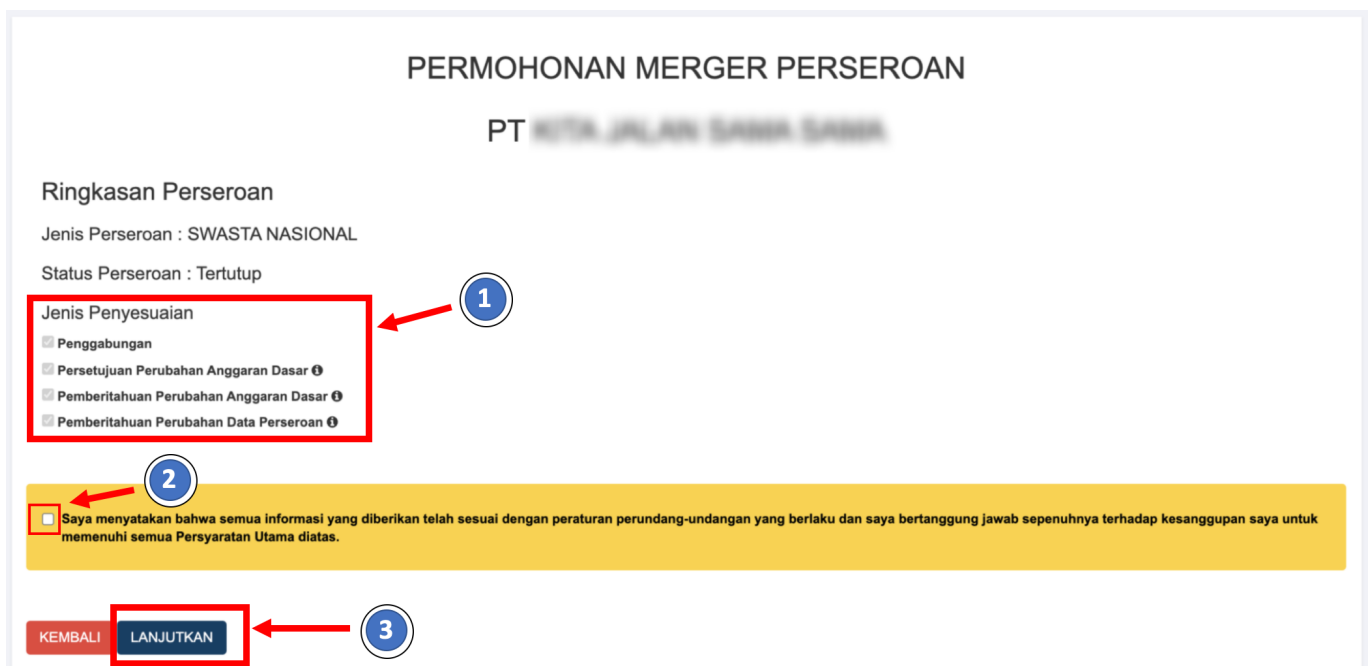
LANJUTKAN

3

1. Ceklis Persyaratan Utama
2. Ceklis *disclaimer*
3. Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup *disclaimer*



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin**, lalu masuk ke halaman **Ringkasan Perseroan**.



Pada halaman **Ringkasan Perseroan** terdapat :

1. **Jenis Perseroan**, **Status Perseroan** dan **Jenis Penyesuaian** telah otomatis tercekli sesuai dengan pemesanan nomor *voucher* sebelumnya.
2. Ceklis *disclaimer*
3. Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** maka akan tampil halaman **Permohonan Merger Perseroan untuk Pengisian data penggabungan Perseroan**.

c. Pengisian Data Merger

1. Klik tombol **Tambah Perseroan**
2. Kemudian **isikan Perseroan** yang ingin dilakukan penggabungan
3. Isikan **Nomor Akta Penggabungan**

4. Isikan **Tanggal Akta Penggabungan**
5. Ceklis *disclaimer*
6. Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** maka akan tampil halaman **Permohonan Merger untuk Pengisian data RUPS**

d. Pengisian data RUPS dan Surat Kabar

Permohonan Merger

PT **HALO HALO BANDUNG** disingkat PT H

Tanggal

RUPS / Berita Acara
Rapat / Notulen Rapat:

1

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak:

Nama Surat Kabar:

Tanggal Efektif:

Tambah

2

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
<input checked="" type="checkbox"/>	NEGARA REPUBLIK INDONESIA		Tanpa Klasifikasi : 30
<input checked="" type="checkbox"/>			Tanpa Klasifikasi : 120
<input type="checkbox"/>		DIREKTUR	
<input checked="" type="checkbox"/>		PRESIDEN KOMISARIS	
<input checked="" type="checkbox"/>		KOMISARIS INDEPENDEN	

3

Persyaratan Utama

Perseroan Tertutup

Langsung kepada pemegang saham, Akta Pemindahan Hak Atas Saham

Akta Notaris

Akta dibawah tangan

Melalui Direksi

a. Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut

b. Rancangan Pengambilalihan (akuisisi)

c. Akta Pemindahan Hak Atas Saham

Akta Notaris

Akta di bawah tangan

Perseroan Terbuka

4

5

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI

LANJUTKAN

6

1. Isikan **Tanggal RUPS**
2. Isikan **Pengumuman Surat Kabar**
3. Ceklis **Kehadiran RUPS**
4. Ceklis **Persyaratan Utama**
5. Ceklis *disclaimer*
6. Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** maka akan tampil halaman **Permohonan Perubahan**

e. Pemilihan Jenis Perubahan

Permohonan Perubahan

PT BINA INDUSTRI

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- Nama
- Tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan
- Jangka waktu
- Peningkatan Modal dasar
- Pengurangan Modal dasar
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

- Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor
- Jenis Perseroan
- Pasal 1 ayat 1
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 4 ayat 1
- Pasal 4 Ayat 2
- Pasal 4 ayat 3
- Pasal 4 ayat 4
- Pasal 4 ayat 5
- Pasal 4 ayat 6
- Pasal 4 ayat 7
- Pasal 4 ayat 8
- Pasal 4 ayat 9
- Pasal 4 ayat 10
- Pasal 4 ayat 11
- Pasal 4 ayat 12
- Pasal 4 ayat 13
- Pasal 4 ayat 14
- Pasal 4 ayat 15
- Pasal 5
- Pasal 6
- Pasal 7
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 11 ayat 3
- Pasal 11 ayat 2.a(4)
- Pasal 12
- Pasal 13
- Pasal 14
- Pasal 14 Ayat 3
- Pasal 14 Ayat 5
- Pasal 15
- Pasal 16
- Pasal 17
- Pasal 18
- Pasal 19
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22
- Pasal 23
- Pasal 24
- Pasal 25
- Pasal 26
- Pasal 27
- Pasal 28
- Pasal 29
- Pasal 30
- Pasal 31
- Pasal 32
- Pasal 33
- Pasal 34
- Pasal 35
- Pasal 36
- Pasal 37
- Pasal 38
- Pasal 39
- Pasal 40
- Pasal 41
- Pasal 42
- Pasal 43
- Pasal 44
- Pasal 45
- Pasal 46
- Pasal 47
- Pasal 48
- Pasal 49
- Pasal 50
- Pasal 51
- Pasal 52
- Pasal 53
- Pasal 54
- Pasal 55
- Pasal 56
- Pasal 57
- Pasal 58
- Pasal 59
- Pasal 60
- Pasal 61
- Pasal 62
- Pasal 63
- Pasal 64
- Pasal 65
- Pasal 66
- Pasal 67
- Pasal 68
- Pasal 69
- Pasal 70
- Pasal 71
- Pasal 72
- Pasal 73
- Pasal 74
- Pasal 75
- Pasal 76
- Pasal 77
- Pasal 78
- Pasal 79
- Pasal 80
- Pasal 81
- Pasal 82
- Pasal 83
- Pasal 84
- Pasal 85
- Pasal 86
- Pasal 87
- Pasal 88
- Pasal 89
- Pasal 90
- Pasal 91
- Pasal 92
- Pasal 93
- Pasal 94
- Pasal 95
- Pasal 96
- Pasal 97
- Pasal 98
- Pasal 99
- Pasal 100

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- 1. Direksi dan Komisaris
- 2. Peralihan saham
- 3. Ganti nama pemegang saham
- 4. Pengangkatan Kembali
- 5. Alamat Lengkap Perseroan

[KEMBALI](#) [LANJUTKAN](#)

Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1) Form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri******

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

Nama

Persyaratan Perubahan Nama

Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

- 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan
- 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
 - Kementerian Pariwisata
 - Kementerian ESDM
 - Kementerian Komunikasi dan Informasi
 - Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
 - Kementerian Perhubungan
 - Otoritas Jasa Keuangan
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Dan lain-lain

Jangka waktu

Peningkatan Modal dasar

Peringatan Perubahan Peningkatan Modal Dasar

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pengurangan Modal dasar

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

- Permohonan Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS
- Setelah jangka waktu 60 hari
 - 1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
 - 2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
 - 3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1. Tidak ada keberatan
- 30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Tanggal RUPS

Tanggal

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak

Nama Surat Kabar

Status Perseroan

Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri** :

1. Ceklis **Nama** jika ada perubahan pada Nama Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Nama

2. Ceklis **Tempat Kedudukan** jika ada perubahan pada Tempat Kedudukan Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

3. Ceklis **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan** jika ada perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

4. Ceklis **Jangka Waktu** jika ada perubahan pada Jangka Waktu Perseroan

5. Ceklis **Peningkatan Modal Dasar** jika ada Peningkatan Modal Dasar Perseroan

6. Ceklis **Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor** jika ada Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor pada Perseroan

- Ceklis Permohonan
- Ceklis Setelah jangka waktu 60 hari
- Isi tanggal RUPS
- Isi Tanggal Cetak Surat Kabar
- Isi Nama Surat Kabar

7. Ceklis **Status Perseroan** jika ada perubahan pada Status Perseroan

- Ceklis Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

2) Form ****Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan****

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

Peringatan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

1. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan Perseroan
2. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
3. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benda tidak bergerak ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
4. Bilaman PMA: Harus memiliki Izin Prinsip BKPM

Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

Izin Prinsip BKPM

Pasal 1 ayat 1

Pasal 1 ayat 2

Persetujuan Dewan Komisaris

Pasal 4 ayat 1

Pasal 4 Ayat 2

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 3 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 4 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 6 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 7 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 8 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 9 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 10 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 11 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 12 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 13 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 14 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 15 | | | |
| <input type="checkbox"/> Pasal 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 6 | <input type="checkbox"/> Pasal 7 | <input type="checkbox"/> Pasal 8 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 9 | <input type="checkbox"/> Pasal 10 | <input type="checkbox"/> Pasal 11 | <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat 3 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat 2.a(4) | <input type="checkbox"/> Pasal 12 | <input type="checkbox"/> Pasal 13 | <input type="checkbox"/> Pasal 14 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 14 Ayat 3 | <input type="checkbox"/> Pasal 14 Ayat 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 15 | <input type="checkbox"/> Pasal 16 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 17 | <input type="checkbox"/> Pasal 18 | <input type="checkbox"/> Pasal 19 | <input type="checkbox"/> Pasal 20 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 21 | <input type="checkbox"/> Pasal 22 | <input type="checkbox"/> Pasal 23 | <input type="checkbox"/> Pasal 24 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 25 | <input type="checkbox"/> Pasal 26 | <input type="checkbox"/> Pasal 27 | <input type="checkbox"/> Pasal 28 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 29 | <input type="checkbox"/> Pasal 30 | <input type="checkbox"/> Pasal 31 | <input type="checkbox"/> Pasal 32 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 33 | <input type="checkbox"/> Pasal 34 | <input type="checkbox"/> Pasal 35 | <input type="checkbox"/> Pasal 36 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 37 | <input type="checkbox"/> Pasal 38 | <input type="checkbox"/> Pasal 39 | <input type="checkbox"/> Pasal 40 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 41 | <input type="checkbox"/> Pasal 42 | <input type="checkbox"/> Pasal 43 | <input type="checkbox"/> Pasal 44 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 45 | <input type="checkbox"/> Pasal 46 | <input type="checkbox"/> Pasal 47 | <input type="checkbox"/> Pasal 48 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 49 | <input type="checkbox"/> Pasal 50 | <input type="checkbox"/> Pasal 51 | <input type="checkbox"/> Pasal 52 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 53 | <input type="checkbox"/> Pasal 54 | <input type="checkbox"/> Pasal 55 | <input type="checkbox"/> Pasal 56 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 57 | <input type="checkbox"/> Pasal 58 | <input type="checkbox"/> Pasal 59 | <input type="checkbox"/> Pasal 60 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 61 | <input type="checkbox"/> Pasal 62 | <input type="checkbox"/> Pasal 63 | <input type="checkbox"/> Pasal 64 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 65 | <input type="checkbox"/> Pasal 66 | <input type="checkbox"/> Pasal 67 | <input type="checkbox"/> Pasal 68 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 69 | <input type="checkbox"/> Pasal 70 | <input type="checkbox"/> Pasal 71 | <input type="checkbox"/> Pasal 72 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 73 | <input type="checkbox"/> Pasal 74 | <input type="checkbox"/> Pasal 75 | <input type="checkbox"/> Pasal 76 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 77 | <input type="checkbox"/> Pasal 78 | <input type="checkbox"/> Pasal 79 | <input type="checkbox"/> Pasal 80 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 81 | <input type="checkbox"/> Pasal 82 | <input type="checkbox"/> Pasal 83 | <input type="checkbox"/> Pasal 84 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 85 | <input type="checkbox"/> Pasal 86 | <input type="checkbox"/> Pasal 87 | <input type="checkbox"/> Pasal 88 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 89 | <input type="checkbox"/> Pasal 90 | <input type="checkbox"/> Pasal 91 | <input type="checkbox"/> Pasal 92 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 93 | <input type="checkbox"/> Pasal 94 | <input type="checkbox"/> Pasal 95 | <input type="checkbox"/> Pasal 96 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 97 | <input type="checkbox"/> Pasal 98 | <input type="checkbox"/> Pasal 99 | <input type="checkbox"/> Pasal 100 |

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor** jika ada Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan
2. Ceklis **Jenis Perseroan** jika ada perubahan pada Jenis Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan
3. Ceklis **Pasal** yang mengatur Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

3) form ****Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan****

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

1. Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontrak Karya
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

2. Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

3. Ganti nama pemegang saham

4. Pengangkatan Kembali

5. Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

[KEMBALI](#)[LANJUTKAN](#)

Pada form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Direksi dan Komisaris** jika ada perubahan data Direksi dan Komisaris Perseroan
2. Ceklis **Peralihan Saham** jika ada perubahan Peralihan Saham Perseroan
3. Ceklis **Ganti Nama Pemegang Saham** jika ada perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan
4. Ceklis **Alamat Lengkap Perseroan** jika ada perubahan Alamat Lengkap Perseroan

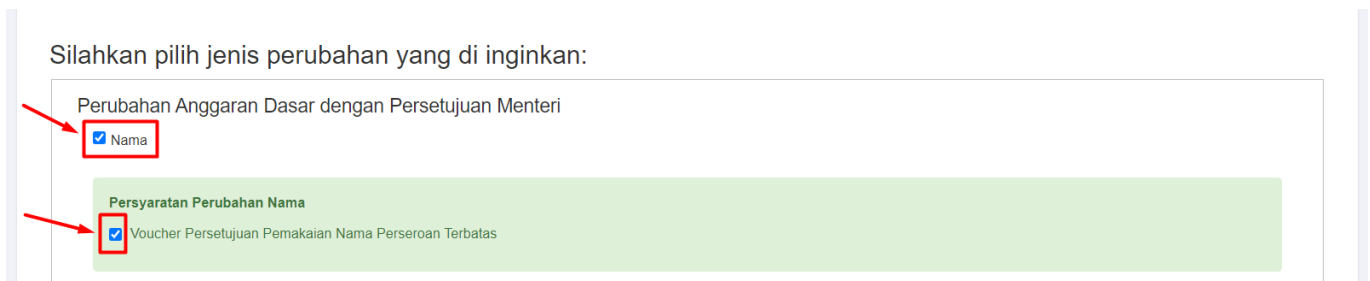
- Ceklis Persyaratan Perubahan Lengkap perseroan
- Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar alert perhatian!!!



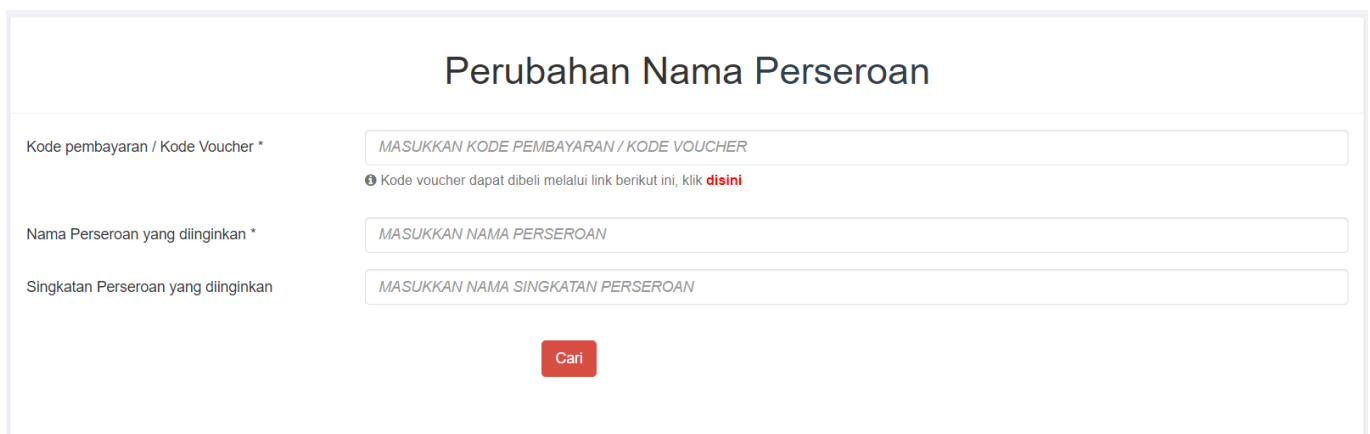
- Klik tombol **Saya Yakin** untuk melanjutkan

4) Perubahan Nama Perseroan

- Jika Pilihan Jenis Perubahan pada **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar** yang dicentang **Nama** maka wajib centang persyaratan memiliki **Voucher Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



- Setelah pemilihan jenis perseroan, maka sistem akan menampilkan halaman **Perubahan Nama Perseroan**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



- Klik **disini** untuk melakukan pembelian voucher **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar**

Perseroan

- Kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Konfirmasi Pembayaran Konsultasi Pembayaran Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON * [input field]

EMAIL PEMOHON * [input field]

NOMOR HP * [input field]

Pembelian voucher sebesar **Rp 100.000**. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol **BELI** untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**, lalu tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan PEMBAYARAN PNB SECARA ONLINE SABH

Cek Pemesanan Voucher List Voucher

DIREKTORAT JENDERAL AHU BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER BADAN HUKUM Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ⁽¹⁾	:	[redacted]
NAMA PEMOHON	:	[redacted]
NOMOR REKENING	:	[redacted]
EMAIL PEMOHON	:	[redacted]
NOMOR HP	:	[redacted]
TANGGAL TRANSAKSI	:	[redacted]
TANGGAL EXPIRED	:	[redacted]
(PEMBAYARAN TERAKHIR) TAGIHAN	:	Rp 100.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

Cari

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 460 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas	<input type="text"/>	Rp. 100.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik **Lanjutkan Transaksi** untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Nama Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

Perubahan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

📌 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Cari

- Kemudian masukkan **Kode pembayaran/Kode Voucher, Nama Perseroan yang diinginkan.**
- Lalu klik tombol **Cari**
- Jika **Nama Perseroan yang diinginkan** sudah ada, maka akan muncul notifikasi seperti berikut:

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Cari

⚠ Perseroan "INDONESIA TANAH AIRKU" sudah ada dalam database SABH silahkan cari nama yang lain.

- Jika **Nama Perseroan yang diinginkan** tidak ada, maka sistem akan memuat halaman Cek Nama Perseroan berisi informasi nama perseroan yang telah dipesan dan daftar nama perseroan yang mirip.

SAYA YAKIN DAN LANJUTKAN

- Checklist pernyataan dibawah halaman dan Klik tombol **SAYA YAKIN DAN LANJUTKAN** untuk melanjutkan Pemesanan Nama Perseroan.

*Nama Perseroan yang Anda pilih adalah [REDACTED]
*Harap Anda periksa kembali sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!
Terdapat kemiripan nama [REDACTED] dengan nama yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Status
1	[REDACTED]	terdaftar
2	[REDACTED]	terdaftar
3	[REDACTED]	terdaftar
4	[REDACTED]	terdaftar
5	[REDACTED]	terdaftar
6	[REDACTED]	terdaftar
7	[REDACTED]	terdaftar
8	[REDACTED]	terdaftar
9	[REDACTED]	terdaftar
10	[REDACTED]	antrian

Saya menyatakan apabila nama yang digunakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka saya bersedia mengganti nama tersebut atau pendaftaran badan hukum yang menggunakan nama tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.

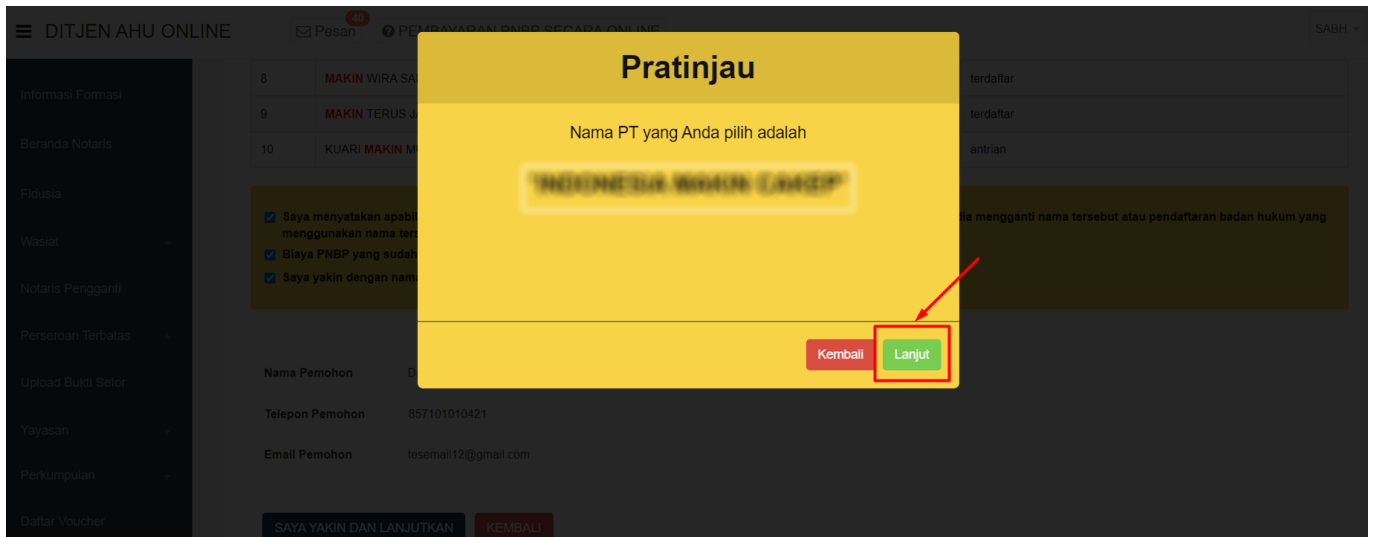
Biaya PNBPN yang sudah digunakan tidak dapat diminta kembali.

Saya yakin dengan nama yang saya gunakan dan saya mengetahui tidak dapat mengubah nama setelah tahapan ini.

Nama Pemohon: [REDACTED]
Telepon Pemohon: [REDACTED]
Email Pemohon: [REDACTED]

SAYA YAKIN DAN LANJUTKAN **KEMBALI**

- Maka akan keluar **Popup Disclaimer**, seperti berikut. Kemudian klik **Lanjut**



- Kemudian akan diarahkan masuk ke laman **Form Isian Merger Perseroan Terbatas**

f. Pengisian data perubahan

- Kemudian akan masuk ke form isian data perseroan
- Pemohon dapat melakukan perubahan sesuai data yang terbuka
- data dapat diubah/terbuka sesuai dengan pilihan perubahan yang dipilih pada tahapan sebelumnya

DITJEN AHU ONLINE
Peserta PEMBAYARAN PNBP SECARA ONLINE
SAMB -

Informasi Formasi
 Informasi Notaris
 Fiduaria
 Usahat
 Notaris Pengantar
 Perseroan Terbatas
 Laporan Rasio Sektor
 Yayasan
 Perkampungan
 Daftar Voucher
 Perbaikan Data
 Tindakan

Format Isian Merger Perseroan Terbatas

Ketik isian yang beranda - wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan:

Nama Singkatan:

Jenis Perseroan: SWASTA NASIONAL

NPWP Perseroan:

Jangka Waktu Perseroan: TIDAK TERBATAS

Status Perseroan: tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi: Kabupaten:

DOMISILI PERSEROAN

Alamat:

RT: RW:

Kecamatan: Kelurahan/Desa:

Kode Pos: Nomor Telepon:

Maksud dan Tujuan

Tentukan Data

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI	Aksi
1	01111	Perdagangan Jajangan	Kelompok ini mencakup usaha peredaran komoditas jajangan mulai dari kegiatan pengangkutan bahan, penanganan, pemeliharaan, dan juga penanganan dan pasca panen (juga meliputi satu kesatuan kegiatan tanaman jajangan). Termasuk kegiatan pembelian dan penjualan tanaman jajangan.	<input type="checkbox"/>
2	01112	Perdagangan Gerdam	Kelompok ini mencakup usaha peredaran komoditas mulai dari kegiatan pengangkutan bahan, penanganan, pemeliharaan, dan juga penanganan dan pasca panen (juga meliputi satu kesatuan kegiatan tanaman serangga pemakan, seperti sorgum/kacang, gandum (kelewatkan) padi (bakery), gandum-bahan (tapi), jawa/udak (padi) dan sebagainya. Termasuk kegiatan pembelian dan penjualan tanaman gerdam.	<input type="checkbox"/>
3	01210	Perdagangan Buah-Anggur	Kelompok ini mencakup usaha peredaran mulai dari kegiatan pengangkutan atau pelepasan, penanganan, pembelian, pemeliharaan, penanganan dan pasca panen buah-buahan. Termasuk kegiatan pembelian dan penjualan tanaman buah anggur.	<input type="checkbox"/>
4	01220	Perdagangan Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Kelompok ini mencakup usaha peredaran mulai dari kegiatan pengangkutan/pelaksanaan, penanganan, pembelian, pemeliharaan, penanganan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti jambu, alpukat, durian, belimbing, kakao, pisang dan lainnya. Termasuk kegiatan pembelian dan penjualan tanaman buah tropis dan subtropis.	<input type="checkbox"/>
5	09500	Aktivitas Penunjang perancangan dan pengalihan tenaga	Kelompok ini mencakup jasa penunjang atau dasar tenaga jasa atau kontak yang dibutuhkan dalam kegiatan perancangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa akomodasi masalah dengan cara tradisional seperti mengoperi corong taji dan membuat observasi potlogi, jasa pemrosesan dan penyusunan hasil labrang dan jasa perolehan pengalihan dan pengalihan labrang atau sumber labrang.	<input type="checkbox"/>
6	26400	Industri Perawatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektrotronik untuk rumah tangga, seperti mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya. Termasuk industri mesin ketik, headphone (radio, stereo, komputer) dan kamera video game dan lainnya.	<input type="checkbox"/>
7	62114	Aktivitas Pengembangan Perangkat Lunak	Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan perangkat lunak, seperti kegiatan implementasi smart contract, perancangan infrastruktur blockchain publik dan blockchain privat. Kelompok ini tidak mencakup pengembangan perangkat komputer awal (seperti OS).	<input type="checkbox"/>
8	64991	Layanan Pembayaran Eksternal Indonesia	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan ekstop nasional, dengan kegiatan usaha meliputi pembayaran, penjemputan, dan/atau asuransi. Kegiatan pembayaran ekstop nasional dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.	<input type="checkbox"/>

AKTA PENGABUNGAN

Nomor Akta:

Tanggal Akta:

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 2.000	25.000	Rp. 50.000.000
Total modal dasar Rp. 50.000.000			

MODAL DITEMPAHKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 2.000	25.000	Rp. 50.000.000
Total modal ditempatkan Rp. 50.000.000			

MODAL DISETOR

Rp. 50.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Pemegang Jabatan	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
Ya	<input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	12.500	DIREKTUR	Rp. 25.000.000
Ya	<input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	12.500	KOMISARIS	Rp. 25.000.000

Seluruh Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

DAFTAR PERSEROAN

Perseroan Yang Di Merger

Nama Perseroan: Nomor SK Terakbit:

Perseroan Yang Menerima Merger

Nama Perseroan: Nomor SK Terakbit:

Pemilik Manfaat

* Wajib diisi

Kemendagri melalui Peraturan Menteri dan BSM dalam melakukan pemantauan tidak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui korporasi, menanggapi kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 (Undang -

Peraturan Menteri (Korupsi dan) Nomor 15 Tahun 2015 (Undang -

Peraturan Menteri (Korupsi dan) Nomor 21 Tahun 2015 (Undang -

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Notaris Pengantar

Apakah Anda Notaris Pengantar?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendaftaran Perseroan sudah benar.

2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendaftaran Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang dilampirkan pada kantor saya telah sesuai.

4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendaftaran Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendaftaran Perseroan.

5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI
LANJUTKAN

g. Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

• Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut:

1. Jika data **Pemilik Manfaat** sudah ada pada transaksi sebelumnya seperti pada gambar dibawah ini. Maka pemohon dapat langsung melanjutkan transaksinya. Jika ingin melakukan perubahan/pengkinian data, dapat di lakukan melalui [Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi](#)

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
Wahyuni, Nurul Huda	9102010010000	1980-01-01 Tuban	WNI	Jl. Pahlawan, RT 001/ RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Tuban	9102010010000	Pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan
Wahyuni, Nurul Huda	9102010010000	1980-01-01 Tuban	WNI	Jl. Pahlawan, RT 001/ RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Tuban	9102010010000	Pemegang Saham
Wahyuni, Nurul Huda	9102010010000	1980-01-01 Tuban	WNI	Jl. Pahlawan, RT 001/ RW 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Tuban	9102010010000	Pemegang saham dan Direktur Perseroan

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

2. Jika data **Pemilik Manfaat** belum ada isi sebelumnya, maka pemohon wajib mengisi data, sesuai tahapan berikut ini:

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

• Untuk mengisi data Pemilik Manfaat, pengguna dapat langsung Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.


Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

- Kemudian Pengguna dapat memilih kriteria pemilik manfaatnya, dalam hal ini jika sudah memilih kriteria antara a/b/c/d maka tidak dapat memilih e/f/g, begitu pula sebaliknya.

- Setelah memilih kriteria, Klik tombol  untuk melakukan pengisian data pemilik manfaatnya.
- Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol



Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

Data Pemilik Manfaat :

Nama Lengkap *
andip

Jenis Identitas *
 NIK SIM Paspor

Nomor Identitas *
1234567891011123456

Tempat Lahir * **Tanggal Lahir ***
Bandung 15-08-2002

Kewarganegaraan *
 WNI WNA

Provinsi * **Kabupaten ***
JAWA BARAT KOTA BANDUNG

Kecamatan * **Kelurahan ***
SUKANDI SUKAGALIH

Rt **Rw**
001 002

Alamat sesuai kartu identitas *
Bandung

NPWP *
1234567890123456789012345678901234

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *
Pemegang Saham

Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

- Data yang telah di isikan, akan tampil pada tabel seperti berikut ini:

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
...	WNI	Bandung	Edit Hapus

h. Persyaratan

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI **LANJUTKAN**

- Ceklis persyaratan dan klik tombol



i. Pratinjau data merger

- Kemudian akan tampil halaman **Pratinjau Merger Data Perseroan**

PRA TINJAU PERUBAHAN MERGER DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : SWASTA NASIONAL

DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN :
 NPWP PERSEROAN :
 JANGKA WAKTU :
 KEDUDUKAN :
 KECAMATAN :
 ALAMAT :
 RT : RW :
 KODE POST : NOMOR TELEPON :

MAKSUD DAN TUJUAN

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	URAIAN KBLI
1	01112	PERTANIAN GANDUM	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN GANDUM MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN SEREALIA GANDUM, SEPERTI SORGUM/CANTEL, GANDUM (WHEAT/OATS), JELAI (BARLEY), GANDUM HITAM (RYE), JAWAWUT (MILLET) DAN SEJENISNYA. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN GANDUM.
2	01210	PERTANIAN BUAH ANGGUR	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN MULAI DARI KEGIATAN PENYIAPAN ATAU PELAKSANAAN, PENANAMAN, PEMBIBITAN, PEMELIHARAAN, PEMANENAN DAN PASCA PANEN BUAH ANGGUR. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN BUAH ANGGUR.
3	01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN MULAI DARI KEGIATAN PENYIAPAN/PELAKSANAAN, PENANAMAN, PEMBIBITAN, PEMELIHARAAN, PEMANENAN DAN PASCA PANEN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS, SEPERTI RAMBUTAN, ALPUKAT, DURIAN, DUKU, PISANG DAN PISANG RAJA, KURMA, BUAH ARA, PEPAYA, JAMBU BIJI, JAMBU AIR, LENGKENG, NANGKA, NENAS, MANGGA, MANGGIS, SAWO, BELIMBING, SALAK, SIRSAK, BUAH NAGA DAN SEJENISNYA. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN BUAH TROPIS DAN SUBTROPIS.
4	09900	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	KELOMPOK INI MENCAKUP JASA PENUNJANG ATAS DASAR BALAS JASA ATAU KONTRAK, YANG DIBUTUHKAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN GOLONGAN POKOK 05, 07, DAN 08, SEPERTI JASA EKSPLORASI MISALNYA DENGAN CARA TRADISIONAL SEPERTI MENGAMBIL CONTOH BIJIH DAN MEMBUAT OBSERVASI GEOLOGI, JASA PEMOMPAAN DAN PENYALURAN HASIL TAMBANG DAN JASA PERCOBAAN PENGGALIAN DAN PENGEBORAN LADANG ATAU SUMUR TAMBANG.
5	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	KELOMPOK INI MENCAKUP PEMBUATAN PERALATAN ELEKTRONIKA UNTUK RUMAH TANGGA, SEPERTI MIKROFON, LOUDSPEAKER, HEADPHONE, AMPLIFIER DAN SEBAGAINYA. TERMASUK INDUSTRI MESIN KARAOKE, HEADPHONE (RADIO, STEREO, KOMPUTER) DAN KONSOL VIDEO GAME DAN LAINNYA.
6	62014	AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	KELOMPOK INI MENCAKUP KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN, SEPERTI KEGIATAN IMPLEMENTASI SMART CONTRACT, PERANCANGAN INFRASTRUKTUR BLOCKCHAIN PUBLIK DAN BLOCKCHAIN PRIVAT. KELOMPOK INI TIDAK MENCAKUP PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITAS ASET KRIPTO (8815).
7	64991	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL, DENGAN KEGIATAN USAHA MELIPUTI PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN/ATAU ASURANSI. KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL DAPAT DILAKSANAKAN SECARA KONVENSIONAL ATAU BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

AKTA NOTARIS

NO. AKTA :

TANGGAL AKTA :

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 2.000	25.000	Rp. 50.000.000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 2.000	25.000	Rp. 50.000.000

MODAL DISETOR : RP. 50.000.000
 LAINNYA : N/A

Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA		TANPA KLASIFIKASI	12.500	DIREKTUR	RP. 25.000.000
YA		TANPA KLASIFIKASI	12.500	KOMISARIS	RP. 25.000.000

JENIS PERUBAHAN : PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

: - NAMA,MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

KEMBALI SAYA YAKIN

SAYA YAKIN

Klik tombol . Setelah itu akan tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

j. Daftar Transaksi

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
 Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
 Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.** Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Penggabungan	SWASTA NASIONAL		SUDAH BAYAR		ⓘ Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau :

- Klik tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data penggabungan. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

k. Pratinjau dan Unggah Akta

1. Tombol **Perbaharui Data** untuk melakukan perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit data, Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman **Upload Akta**

Unggah Akta *

1. Akta yang di upload sudah sesuai dengan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (4), pasal 25 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) permen hukum dan ham no 1 tahun 2016 tentang perubahan atas permen hukum dan ham no 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas.
2. Akta yang akan di upload adalah keseluruhan akta, dari judul akta sampai ketentuan penutup dan telah ditandatangani dan diberi stempel oleh notaris
3. Kesalahan terhadap upload akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris

Choose File .pdf

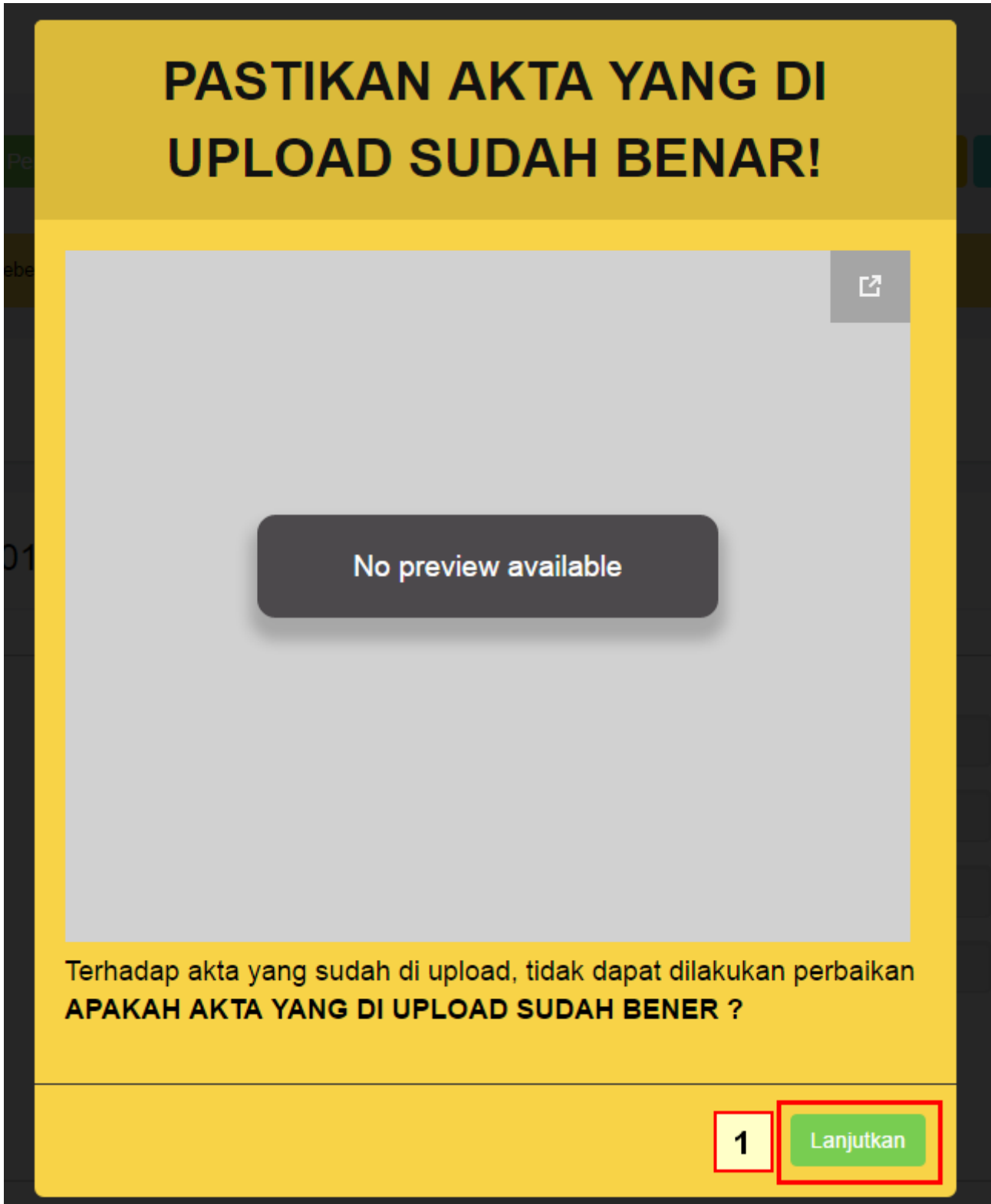
pdf

Akta yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
Waktu upload akta paling lambat adalah 30 hari kalender sejak pernyataan tidak keberatan menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) uu 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Terhadap akta yang telah diupload, tidak dapat dilakukan perbaikan


Klik [disini](#) untuk melihat tutorial memprkecil ukuran upload akta dalam bentuk pdf.

Upload

1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload** , maka akan tampil pop up *preview* seperti gambar dibawah ini.



I. Konfirmasi Permohonan

- Klik tombol  setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

Kembali
Download PDF
Perbaharui Data
Sera Yakin Pratayang Sudah Remor dan Cetak SKSIP
Unggah Lembar Akta
Review Akta

1. Pastikan menyatukan data lebaran merkat.

HAL.11 HAL.12 BERKASAK

Nomor Transaksi: 4019001366420001

DATA PERSEROAN

Nomor SK: AHU-00001366420001-2024-001

Nama Perseroan: PT [REDACTED]

Nama Singkatan: [REDACTED]

Jenis Perseroan: [REDACTED]

NPWP Perseroan: [REDACTED]

Jangka Waktu Perseroan: TIDAK TERBATAS

Status Perseroan: Tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi: KALIMANTAN TIMUR Kabupaten: KABUPATEN KUTAI BARAT

DOMISILI PERSEROAN

Alamat: [REDACTED]

RT: [REDACTED] RW: [REDACTED]

Kecamatan: NYUATAN Kelurahan: MUJIT

Kode POS: [REDACTED] Nomor Telepon: [REDACTED]

Email: [REDACTED] Tahun Baku: [REDACTED]

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD PERTANIAN, KEKULTURAN DAN PETERNAKAN
TUJUAN PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YEBI
 PETERNAKAN
 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA
 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA

MAKSUD PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI
TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 PENGUMPULAN AIR LIMBAH
 PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA

MAKSUD REAL ESTAT
TUJUAN REAL ESTAT
 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARAWISATA
 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

AKTA NOTARIS

Nama: [REDACTED]

Nomor Akta: [REDACTED] Tanggal Akta: [REDACTED]

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000	400	Rp. 4.000.000
Total modal dasar Rp. 4.000.000			

MODAL DITEMPAHKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000	150	Rp. 1.500.000
Total modal ditempatkan Rp. 1.500.000			

MODAL DISETOR

Rp. 1.500.000

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Penanggung Jawab	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
Negara Republik Indonesia	Tidak	Tanpa Klasifikasi	30		Rp. 300.000
DIREKTUR	Tidak	Tanpa Klasifikasi	100	DIREKTUR	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	Ya	Tanpa Klasifikasi	20	KOMISARIS	Rp. 200.000

Pemilik Manfaat

No	Pemilik Manfaat	Data Pemilik Manfaat	Kriteria Pemilik Manfaat
1	DIREKTUR	Tipe Pemilik Manfaat: Penangan Nama: DIREKTUR SIK, Tempat Lahir: [REDACTED], Tanggal Lahir: [REDACTED], Alamat: [REDACTED], Kewarganegaraan: YANG NPWP: [REDACTED], Hubungan: Pemegang Saham	a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar c. Memiliki kuorserting atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, mengabdikan, atau memberhentikan anggota dewan dan anggota dewan komite

DAFTAR PERSEROAN

Perseroan Yang Di Merger

Nama Perseroan	Nomor SK Terakhir
[REDACTED]	AHU-00001366420001-2024-001

Perseroan Yang Menerima Merger

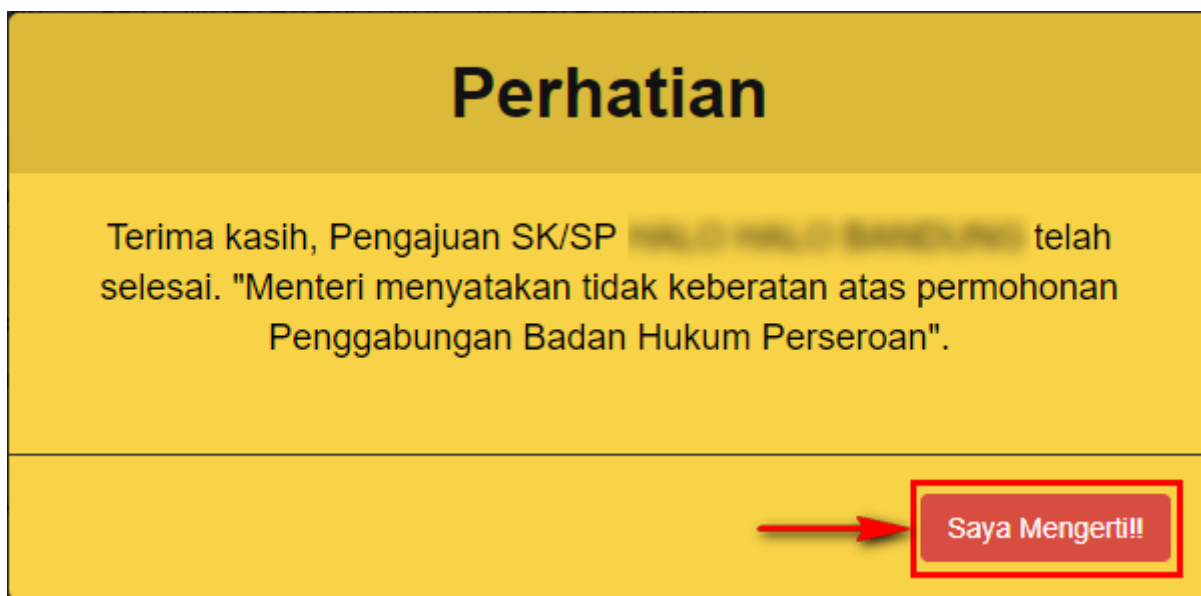
Nama Perseroan	Nomor SK Terakhir
PT [REDACTED] dengan PT [REDACTED]	AHU-00001366420001-2024-001

DOWNLOAD

Download Akta

Kembali

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, akan muncul pop up Perhatian



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu akan tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Penggabungan	SWASTA NASIONAL		SUDAH BAYAR		SP Perubahan Data Perseroan SP Penggabungan Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

m. Download SK/SP

- Setelah itu terdapat **SP Perubahan Data Perseroan** dan **SP Penggabungan Perseroan** yang dapat di *download*, yaitu :

1. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik [SP Perubahan Data Perseroan](#) untuk mendownload SP Perubahan Data Perseroan
- Kemudian tampil **SP Perubahan Data Perseroan** seperti gambar dibawah ini



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

Kepada Yth.
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor Tanggal yang dibuat oleh Notaris , berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT disingkat PT**, berkedudukan di KABUPATEN KUTAI BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU- TANGGAL

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

2. SP Penggabungan Perseroan

- Klik [SP Penggabungan Perseroan](#) untuk mendownload SP Penggabungan Perseroan
- Kemudian tampil **SP Penggabungan Perseroan** seperti gambar dibawah ini



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan
PT

Kepada Yth.
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Penggabungan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor Tanggal yang dibuat oleh Notaris , berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal , mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan **PT** **Tbk**, kedalam **PT** **disingkat PT** , berkedudukan di KABUPATEN KUTAI BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal .

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal .

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU- **TANGGAL**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_merger



Last update: **2021/09/10 08:25**